

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN
SANKSI ATAS PELANGGARAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19
(Studi Pada Gugus Tugas COVID-19 Kota Metro)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:
**AYU SYAHIRA GANDA
NPM: 1621020328
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN
SANKSI ATAS PELANGGARAN PEMBATAHAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19
(Studi Pada Gugus Tugas COVID-19 Kota Metro)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

AYU SYAHIRA GANDA

NPM. 1621020461

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs.H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II: Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dikarenakan semakin hari kasus orang yang terpapar Covid-19 kian melonjak. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers yang kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Pada Pasal 93 ayat 1 menjelaskan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 9 ayat (1) yang menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000. Dengan adanya sanksi yang menurut penulis cukup berat, masih ada sebagian orang yang masih menyepelekan pandemi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Metro dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasyah Terhadap Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Metro dan memahami bagaimana Pandangan Fiqh Siyasyah Terhadap Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan populasi sampel. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum primer yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi

dan sumber hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, makalah, berita atau artikel. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara Pengolahan bahan hukum yaitu dengan cara klasifikasi bahan hukum dan pengkajian bahan hukum dengan metode pengolahannya, yaitu *klasifikasi* dan *systematizing*.

Hasil Penelitian ini, yaitu : *pertama*, Peran gugus tugas dalam pecepatan penanganan Covid-19 di Kota Metro saling berkesinambungan dan saling bekerja sama dalam penanggulangan bencana yang terjadi ini yakni TNI, Polres, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP, kecamatan untuk survive ke lapangan kemudian memberikan laporan. *Kedua*, Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yaitu dengan melakukan pendisiplinan terhadap pelaku pelanggaran pembatasan sosial berskala besar dengan tidak memberikan sanksi yang bersifat pidana dan denda karena masih dapat dilakukan pembinaan dalam upaya mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan konsep *fiqh siyasah* yang mengedepankan kemaslahatan, terutama kemaslahatan bagi masyarakat supaya dapat terhindar dari paparan Covid-19.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Syahira Ganda
NPM : 1621020328
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'yyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam percepatan Penanganan Covid-19 (Studi Pada Gugus Tugas Covid-19 Kota Metro"** adalah benar - benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Februari 2021

Penulis



Ayu Syahira Ganda

1621020328



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP
PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 (Studi Pada Gugus Tugas COVID-19
Kota Metro)**

Nama : Ayu Syahira Ganda

NPM : 1621020328

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'yyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Rade Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.Irwantoni, M.Hum

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

NIP. 196010211991031003

NIP-

**Mengetahui,
Ketua Prodi Psikologi Islam**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sanksi Atas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penangann COVID-19 (Studi Pada Gugus Tugas COVID-19 Kota Metro)**. Disusun oleh **Ayu Syahira Ganda, NPM : 1621020328**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**. Telah di ujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 07 Juni 2021**. Waktu : **11.00-13.00 WIB**, Tempat: **GSG Syari'ah lantai 1**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. M Yasir Fauzi, M.H

Sekretaris : Muhammad Jayus, M.H.I

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Penguji III : Dani Amran Hakim, SH.,MH

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung



Dr. H. Khairuddin. M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(Q.S An-Nisa 4: 58).

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayah kandung saya tercinta Khoirunsyah, Ibunda kandung saya Umiyati dan Bapak Imam Ghozali sebagai orangtua kedua saya, yang mana mereka telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang yang selalu mereka berikan. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah ridhonya orangtua.
2. Kedua adik tersayang Fatiah Nur Sabrina dan Reysia Amelia Tanti Ghozali yang selalu mensupport dan memberi arahan serta penguatan mental dalam proses panjang pengerjaan skripsi ini, terimakasih selalu memberikan nasehat dan semangat selama proses belajar ini.
3. Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ayu Syahira Ganda, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Khoirunsyah dan ibu Umiati yang dilahirkan di Bandar Lampung 12 Februari 1998.

Penulis memasuki Pendidikan dimulai dari :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Bustanul Alfa Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2004
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Paguyuban Bandar Sribhawono, lulus pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2016.
4. Pada September 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan menyelesaikan Studi Strata Satu Hukum Tata Negara Pada Tahun 2021 dengan gelar Ayu Syahira Ganda, S.H.

Bandar Lampung, 07 Februari 2021
Penulis,

Ayu Syahira Ganda
1621020328

KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmat- Nya yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 (Studi Pada Gugus Tugas COVID-19 Kota Metro)”.

Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana S1 pada Fakultas Syariah program studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu baik dalam bimbingan dan saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frengki, M.si. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan/Prodi yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Drs.H. Irwantoni, M.Hum. dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H, M.H. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, serta memberikan saran, bimbingan dan arahan.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan sebagai tempat menimba ilmu.
8. Untuk organisasi Extra yang sedang diikuti penulis terimakasih telah mengajarkan hal-hal baru dan serta mengajarkan arti kebersamaan dan kekeluargaan.
9. Untuk Bajang Squad (Dahlya, Nikmah, Siti, Permata, Nendi, dan Noval) kemudian untuk Team Huru Hara (Nova, Misda, Inti, Rere, Putri, Reri, Lina, Revi, Tomi, dan Geri) sahabat-sahabat yang sangat baik. Betapa bersyukurnya saya memiliki kalian dalam hidup saya. Terimakasih telah menyediakan pundaknya untuk menangis, selalu memberi bantuan saat saya membutuhkan, mengisi hari-hari saya dan berkontribusi dalam perjuangan saya ini.
10. Untuk orang special yaitu saudara Gentha Febryantoro terimakasih sudah menjadi support system dan menemani dari awal kuliah sampai saya menyelesaikan studi ini. Semoga selalu bersama selamanya.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Jumat 02 juli 2021
Penulis,

Ayu Syahira Ganda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan judul	3
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode penelitian	10
I. Sistematika pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Konsep Tentang Fiqh Siyasah	18
1. Pengertian Fiqh Siyasah	18
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	21
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah	23
B. Pandemi Corona Virus Disaese 19	28
1. Pengertian Pandemi	28
2. Sejarah Munculnya Pandemi	30
3. CoronaVirus Disaese 19.....	33
C. Konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Hukum Positif	35
D. Pengertian Sanksi	38
E. Pengaturan Sanksi PSBB	40

F. Peraturan Daerah Mengenai Pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19	43
BAB III LAPORAN PENELITIAN.....	46
A. Latar Belakang Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 Kota Metro	46
B. Struktur Satuan Tugas Kota Metro	51
C. Peran Satuan Tugas dalam Percepatan Penanganan Covid-19.....	51
D. Penerapan Sanksi Terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	55
E. Faktor Penghambat dan Pendukun.....	63
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	66
A. Analisis Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	66
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun dari judul ini adalah **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 (Studi Pada Gugus Tugas COVID-19 Kota Metro)** yang kemudian mengenai uraian-uraian istilah diatas adalah sebagai berikut :

Analisis ialah suatu kajian yang kemudian dilakukan terhadap setiap permasalahan guna menelaah suatu masalah tersebut secara lebih mendalam.¹ Sedangkan *Fiqh Siyasah* merupakan aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.² Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan analisis *fiqh siyasah* adalah penelaan lebih mendalam terhadap pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara.

Penerapan merupakan suatu proses yang metodenya berawal dari suatu tindakan yang dapat diaplikasikan secara riil yang kemudian menimbulkan atau menciptakan suatu manfaat.³ Sanksi ialah suatu tindakan menghukum dikarenakan suatu sebab dan akibat yang mana isinya terkandung nilai-nilai

¹ Hasbi Ash-Shidique, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 2014), h. 41.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Politik Islam"*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 4

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2010), h. 1343.

mendidik serta memberikan kejerahan kepada pelanggar.⁴ Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁵ Dari tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian penerapan sanksi adalah suatu proses tindakan menghukum terhadap suatu perbuatan melanggar.

Pembatasan Sosial Berskala Besar ialah suatu tindakan pembatasan kegiatan tertentu terhadap penduduk yang wilayahnya tersebut terkena Corona Virus Disease guna mencegah kemungkinan penyebaran wabah Corona Virus Disease.⁶

Percepatan berasal dari kata cepat yang diberi imbuhan per- dan -an menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia percepatan adalah tingkat pertambahan kecepatan.⁷

Penanganan merupakan proses terhadap suatu tindakan dalam memberikan suatu tertentu dengan dilakukan penggarapan menangani situasi tertentu.⁸

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) ialah bagian dari keluarga virus yang mampu menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia yang gejala awal dimulai melalui *Pneumonia* atau paru-paru yang mana virus ini berasal dari kota Wuhan.⁹

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan penerapan sanksi atas pelanggaran yang mengenai pembatasan sosial berskala besar guna menangani dengan cepat

⁴ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aliran Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h. 8.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1350.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 1.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1200.

⁸ Ibid.

⁹ Yuyun Yudaningsih at.al, *Pengenalan COVID-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita*, (Bandung: UIN Sunan Kalijaga, 2020), h. 1.

wabah dari Covid-19 ditinjau berdasarkan disiplin ilmu *fiqh siyasa* selain itu mengenai penerapan peraturan pemerintah di dalam keadaan kehidupan di dalam masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Wabah Covid-19 saat ini menjadi sebuah *problem* yang paling utama di dalam dunia global. WHO sudah mencatat dari banyak 196 negara yang ada di dunia, pada tanggal 26 Oktober ada sebanyak 43 juta kasus sudah terkonfirmasi terjangkit Covid-19. Namun dengan keseluruhan jumlah sebanyak 1,15 juta yang positif dinyatakan meninggal dunia.¹⁰

Rosulullah SAW bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya. Namun, jika terjadi wabah di tempat kamu berada maka jangan tinggalkan tempat itu”.(HR. Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika suatu wabah masuk ke suatu wilayah dalam hal ini membahas Covid-19, maka dilarang bagi orang-orang untuk memasuki wilayah tersebut untuk meminimalisir terjadinya penularan virus. Begitu juga sebaliknya jika ada wabah di daerah yang sedang ditempati, maka dilarang untuk meninggalkan wilayah tersebut, agar tidak terjadinya penyebaran virus.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya

¹⁰ Prianter Jaya Hairi, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Pencegahan COVID-19, *Info Singkat*, Vol. XII, No. 7, (April, 2020), h. 2.

kebijakan antisipatif tersebut. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.¹¹

Dijadikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dari adanya pemberian sanksi terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dikarenakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pecepatan Penanganan Covid-19, tidak terdapat penjelasan petunjuk dari pelaksanaan secara mendalam dan mendetail bagaimana dari penerapan PSBB itu sendiri dapat dijalankan. Bagaimana penerapan baik hak maupun kewajiban rakyat atas suatu penerapan pembatasan sosial berskala besar, serta bagaimana relasinya dengan lembaga lainnya bahkan tidak ada sama sekali sanksi bagi siapa saja baik perorangan maupun instansi korporasi jika melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB).¹².

Dalam Al-Quran mengenai penerapan sanksi bagi pelanggar sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
الْإِنْسَانَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
ذَلِكِ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(Q.S al-Maidah (5): (32))”.

Dari penjelasan ayat di atas dapat dikaitkan dengan wabah bagi mereka yang melanggar dapat dikatakan atau digolongkan sebagai orang yang membawa kerusakan di muka bumi dan menimbulkan kemudharatan. Lantas penelitian kali ini peneliti akan mengalisis terhadap penerapan dan pemberlakuan sanksi bagi para pelanggar PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 ditinjau dari segi *fiqh siyasah*, apakah penerapan sanksi tersebut sudah sesuai dengan karakter dan prinsip Islam atau tidak.

Indonesia sendiri berdasarkan total keseluruhan data dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 20 Oktober 2020 ada sebanyak kurang lebih 368.842 orang yang sudah terpapar Covid-19 dengan total orang yang meninggal dunia sebanyak 12.734 orang, yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Lantas dari total keseluruhan data yang didapat di negara Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang timbul karena dapat terhalangnya untuk melakukan semua tindakan/aktivitas sosial keseharian.¹³

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus Covid-19. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19.

¹³ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Diakses dari <https://covid19.go.id/>, Pada Tanggal 10 Juli 2020, Pukul 22:41 WIB.

Dijelaskan dalam Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 “ setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 9 ayat (1) yang menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).¹⁴ Dengan adanya sanksi yang menurut penulis cukup berat, masih ada sebagian orang yang melanggar aturan ini seperti tidak memakai masker dengan alasan jarak yang ditempuh dekat bagi pengguna kendaraan bermotor serta minimnya kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan Covid-19 atau bisa disebut terlalu menyepelekan pandemi ini.

Penelitian ini dilakukan di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Metro pada tanggal 6 Juli 2020. Pasal 33 Peraturan Walikota ini mengatur tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan di Kota Metro atas pelanggaran pembatasan sosial berskala besar, apakah penerapannya telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

C. Fokus Penelitian

Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan dari suatu penelitian merupakan tindakan untuk membatasi studi secara

¹⁴Ibid.

efektif untuk menyaring suatu informasi.¹⁵ Adapun yang menjadi dari fokus penelitian ini ialah bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Metro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Metro?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasyah Terhadap Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada suatu rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami bagaimana Peran Gugus Tugas dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Metro.
2. Untuk memahami bagaimana Bagaimana Penerapan Sanki atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Perspektif *Fiqh Siyasyah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama *fiqh siyasyah* atau hukum Islam pada umumnya dan khususnya mengenai peraturan perundang-undangan mengenai penerapan sanksi atas pelanggaran pembatasan sosial berskala besar dalam menangani percepatan penanganan Covid-19.
 - b. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang dibidangketatanegaraan Islam mengenai penerapan sanksi atas pelanggar (masyarakat)

¹⁵Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 44.

disebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Secara praktis

- a. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 program studi *Siyasah Syari'iyah* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Memberikan sumbangsih yang aktif ataupun pasif khususnya tentang ilmu ketatanegaraan umumnya sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar terhadap pola pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan mengenai analisis *fiqh siyasah* terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran pembatasan sosial berskala besar dalam percepatan penanganan covid-19 (studi pada gugus tugas covid-19 kota metro), diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Echa Pratiwi Universitas Pelita Harapan dengan judul “Analisis yuridis tentang peraturan yang mengatur ojek online dilarang memabwa penumpang selama masa PSBB yang ditinjau dari undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah melakukan upaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran lebih lanjut melalui berbagai peraturan pemerintah. Beberapa diantaranya adalah Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan.

Munculnya dua peraturan berbeda yaitu Peraturan Menteri tersebut saling bertentangan tentang ojek online membawa penumpang selama masa PSBB berlangsung. hal ini mengharuskan pasal 9 di ajukan ke Mahkamah Agung, namun muncul peraturan yang di lakukan oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 33 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa ojek online hanya boleh di gunakan untuk mengantar barang atau membawa barang, oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum khusus ya masyarakat yg di DKI Jakarta maka menggunakan peraturan gubernur. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Echa Pratiwi, penelitian ini memfokuskan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembatasan sosial berskala besar.¹⁶ Berbeda dengan penelitian Echa Wahyudi yang membahas tentang peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi ojek online sedangkan penelitian ini membahas tentang peran satuan tugas dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

2. Moh. Yusuf (2020), Fakultas Teknik, Universitas Pancasakti Tegal, yang berjudul Analisa Terhadap Perubahan Kebijakan Local Lock Down Menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Upaya Penanganan Covid-19 Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Kota Tegal. Hasil penelitian yang dilakukan Moh. Yusuf adalah analisis tingkat pelayanan pada saat di berlakukanya local lockdown dan pada saat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hari kerja memiliki tingkat penurunan pada Jl R.A Kartini sebesar -40%, untuk Jl A. Yani memiliki penurunan sebesar -41%, jl Pantura arah arah Kota Tegal sebesar -12% dan untuk jl.

¹⁶ Echa Pratiwi, “Analisis yuridis tentang peraturan yang mengatur ojek online dilarang memabwa penumpang selama masa PSBB yang ditinjau dari undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan”, (Universitas Pelita Harapan, 2020), h. 72

Pantura arah Pemalang memiliki penurunan sebesar -25% dan pada saat di berlakukanya local lockdown dan pada saat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hari Weekend memiliki tingkat penurunan pada Jl R.A Kartini sebesar -37%, untuk Jl A. Yani memiliki penurunan sebesar -41%, jl Pantura arah arah Kota Tegal sebesar -16% dan untuk jl. Pantura arah Pemalang memiliki penurunan sebesar -35%. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh.Yusuf yaitu tentang perubahan kebijakan lock down menjadi pembatasan sosial berskala besar, penelitian ini membahas tentang sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar peraturan pembatasan sosial berskala besar.¹⁷ Dalam penelitian Moh. Yusuf membahas tentang kebijakan Lock Down yang kemudian berubah menjadi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, tidak jauh berbeda penelitian ini juga membahas tentang sanksi yang diberikan oleh satuan tugas kepada para pelanggar PSBB.

Dari dua sumber di atas dapat dikemukakan di sini bahwa meski pada sisi topik penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan yang tegas terutama dalam hal sudut tinjauan dan lokasi penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitan, di mana metode bisa diartikan sebagai tata cara bagaimana suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis guna mewujudkan kebenaran.¹⁸

¹⁷ Moh. Yusuf, “Analisa Terhadap Perubahan Kebijakan Local Lock Down Menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Upaya Penanganan Covid-19 Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Kota Tegal”, (Program Studi Sarjana Teknik, Universitas Pancasakti Tegal, 2020), h.80

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 24.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai pengetahuan yang benar diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada didalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,¹⁹ sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, sehingga dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan wawancara dan pendataan yang berkaitan dengan lapangan. Sehingga terkait dengan hal ini, penulis melakukan penelitian Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kekarantinaan Kesehatan Perspektif *siyasah*.

b. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat normatif kualitatif yaitu dimana merupakan suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan secara objektif terkait perspektif *fiqh siyasah* mengenai

¹⁹Ibid., h.7.

penerapan sanksi dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²⁰ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.²¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pencegahan *Corono Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Metro yang semuanya berjumlah 110 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²² Tujuan Penelitian ini ngambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *Proposive Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi sampel di dalam penelitian ini ada 7 orang yang berasal dari bidang pencegahan *Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Metro yang terdiri dari Kapolsek Metro Timur, DanRamil 411-16/MP, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Kabid Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Perda Satuan Polisi Pamong Praja, Lurah Tejo sari Metro Timur dan Camat Metro Timur.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2014), h.173

²¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h.53

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mundur Maju, 1986), h. 148.

2. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.²³ Data dalam skripsi ini merupakan data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari dan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data hukum sekunder ini mencakup tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, di antaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri atas :

- 1) Al-Quran
- 2) Hadits

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan suatu penelitian dari bahan-bahan hukum primer.²⁴ Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari buku misalnya buku *Fiqh Siyasah*, jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, peraturan yang ada misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

²³ Soerjono Soekanto dari Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12.

²⁴Ibid., 53.

a. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaanya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder.²⁵ Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber pada dari kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

3. Metode pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan *survey* lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap suatu penelitian.²⁶ Mengenai penelitian ini, penulis mengamati objek yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²⁷ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti petugas gugus tugas penanganan Covid-19.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, buku, maupun berupa sejarah kehidupan dan sebagainya.²⁸

²⁵Ibid.

²⁶Soeranto Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h. 46.

²⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.373.

²⁸Ibid., 391.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Klasifikasi data, merupakan usaha dalam mengelompokkan, menggolongkan, serta memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat oleh peneliti.
- b. Sistematisasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses penyusunan, pengkategorian data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁹ Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut.

Penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan terhadap suatu analisa data.³⁰ Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.

Kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan metode analisa, yakni metode deduktif. Metode deduktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam

²⁹ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 72.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, , h. 68.

berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus”.³¹ Metode deduktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam pandangan *fiqh siyasah* terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam percepatan penanganan Covid-19.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi yaitu mengenai penerapan sanksi atas pelanggaran pembatasan sosial berskala besar dalam percepatan penanganan Covid-19, ruang lingkup studi mengenai peran gugus tugas dalam percepatan penanganan Covid-19, sistematika penulisan dan kerangka berfikir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar beserta sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran yang dilakukan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Fiqh Siyasah*.

BAB III KAPITAL

Bab ini berisikan mengenai laporan penelitian yang menyangkut tentang gambaran umum dan penyajian fakta serta data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

³¹Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, tanggal 22 November 2020 pukul 23.58 WIB.

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian terhadap peran satuan tugas Kota Metro dalam penanganan Covid-19 serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pembatasan sosial berskala besar.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Tentang Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.¹

Secara terminologis (istilah), *fiqh* menurut ulama-ulama syara' merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan

¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-23.

² Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.27

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

⁴ Ibid., h. 4.

dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* serasa lebih penting dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan. Karena masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syariat *Al-Qur'an* dan *Hadits*.⁶ Sumber hukum yang digunakan dalam *fiqh siyasah* secara umum yaitu :

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup.

b. *Sunnah*

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah *Al-Qur'an* yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat).⁷

c. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari '*illat* hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai '*illat* hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan

⁵ Ibid., h. 2.

⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, h. 30.

⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 53.

pertama. Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁸

d. *Al-maslahah al-mursalah*

Pada umumnya *Al-Mashalahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh *syariat* Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *al-mashalahah al-murshalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-mashalahah al-murshalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.⁹

e. *Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah*

Dalam *fiqh siyasah* *Sadd al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan.¹⁰

f. *Al-'Adah*

Sumber Hukum ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *Al-Adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-Adah as sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *al-.,adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.¹¹

g. *Al-Istihsan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang

⁸ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

⁹ *Ibid.*, h.50

¹⁰ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan*,... h. 51.

¹¹ *Ibid*

menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil.”¹²

h. Istishab

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ahli Ushul Fiqh adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya.

Menurut Ibnu Qayyim, *istishab* adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semula tidak ada.¹³

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.¹⁴

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:¹⁵

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*)
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*siyasah harbiah*)
- e. Administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:¹⁶

- a. Peradilan

¹²*Ibid*

¹³ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 4.

¹⁴ Ibnu Syarif Muzar, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 36.

¹⁵ *Ibid.*, h.38

¹⁶ *Ibid.*, h.39

- b. Administrasi negara
- c. Moneter
- d. Serta hubungan internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional
- c. Dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikirandi atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:¹⁷

- a. Politik pembuatan perundang-undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok:¹⁸

Pertama, politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.15

¹⁸ Ibid., 41

ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

a. Prinsip kedaulatan

Kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan atau *al Hukmiyah* dapat ditemukan dalam Al-Quran:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ
 إِنَّ الْخُكْمَ لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ

“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. Keputusan itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S Yusuf 12:40).

Penjelasan ayat di atas yaitu seseorang tidak menyembah sesuatu selain Allah berupa berhala dan patung kecuali hanya nama tanpa hakikat apapun yang mana disebut Tuhan oleh kalian dan leluhur kalian sendiri. Tidak ada hukum yang berlaku pada suatu hal kecuali hanya milik Allah saja. Itulah agama yang lurus dan teguh. Namun kebanyakan manusia yaitu orang-orang kafir tidak mengetahui semua itu. Begitu pula dengan suatu wabah penyakit yang diturunkan Allah hanyalah semata-mata menguji keimanan umat manusia.

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata Negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan

dari konsep Negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan Negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.¹⁹

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al Quran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S An-Nisa 4: 58).

Penjelasan ayat di atas adalah Allah memerintahkan khususnya kepada para pemimpin untuk menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak, dan jika memberi hukuman kepada manusia sebaiknya dilakukan secara adil, begitu pula halnya dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam kasus Covid-19.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan Negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga Negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

c. Prinsip Musyawarah dan Ijma’

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Quran:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ

¹⁹ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry, Vol 2 No. 1 (2017), h. 53-54.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (Q.S Ali Imran 3:159)

d. Prinsip persamaan²⁰

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Quran:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S Al-Hujarat 49:10).

Penjelasan ayat di atas adalah persaudaraan mengharuskan orang-orang mencintai saudara lainnya sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri, begitupula halnya dalam masalah Covid-19, maka umat manusia harus saling menjaga satu sama lain dengan cara mentaati protokol kesehatan, dengan begitu kita bisa saling menjaga keamanan bersama.

e. Hak dan kewajiban Negara dan rakyat

Prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Quran:

²⁰ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam”, h.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S An-Nisa 4:59).

Penjelasan ayat di atas adalah semua warga Negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya *Arkan Huquh al-Insan*, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.²¹

f. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*

Prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.(Q.S Ali Imran 3:104).

²¹ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam”, h.

Penjelasan ayat di atas ialah *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Filosofi pemimpin Negara juga mirip dengan filosofi seorang Imam dalam shalat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan Imam adalah *mufaraqah* diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan shalat jama'ah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian Imam ditengah shalat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jama'ah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam sistem pergatian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Sebegitu pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar*, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana Al-Quran:

الَّذِينَ إِِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah lah kembali segala urusan”. (Q.S Al-Hajj 22:41).

Peran *amar ma'ruf nahi munkar* tidak hanya diemban oleh para lelaki mukmin tetapi Islam juga membebarkannya kepada para wanita mukminah. Firman Allah dalam Al-Quran:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Q.S At-Taubah 9:71).

B. Pandemi Corona Virus Disease 19

1. Pengertian Pandemi

World Health Organization (WHO) telah resmi menetapkan Covid-19 sebagai sebuah pandemi, secara sederhana ada perbedaan skala penyebaran penyakit, yaitu :²²

a. Wabah

Wabah merupakan skala penyebaran penyakit yang kecil tapi luar biasa, dengan menelusuri penyakit-penyakit sepanjang waktu dan wilayah geografis, para ahli epidemiologi mengetahui cara memprediksi berapa banyak kasus penyakit yang normalnya terjadi di dalam periode waktu, tempat, dan populasi tertentu.

Sebuah wabah adalah peningkatan jumlah kasus yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi.

Bayangkan apabila tiba-tiba jumlah anak kecil yang terkena diare meningkat di sebuah tempat penitipan anak. Satu atau dua anak sakit mungkin saja normal di hari-hari biasa, tapi jika 15 anak sekaligus menderita diare, ini berarti wabah.

²² Rina Tri Handayani, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, Joko Tri Atmojo, *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity*, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Volume 10 No 3, Hal 373 - 380, Juli 2020.

Ketika sebuah penyakit baru muncul, wabah memang jadi lebih jelas terlihat karena jumlah kasus yang diantisipasi akibat penyakit itu masih kosong.

Satu contoh klaster kasus pneumonia yang mencuat tak terduga di kalangan konsumen pasar di Wuhan, Cina. Pejabat kesehatan publik sekarang mengetahui bahwa peningkatan jumlah kasus pneumonia di sana merupakan wabah coronavirus tipe baru, yang kini diberi nama SARS-CoV-2.

Begitu otoritas kesehatan setempat mendeteksi adanya wabah, mereka langsung meluncurkan investigasi guna menentukan secara tepat siapa saja yang terdampak dan berapa banyak orang yang terkena penyakit. Informasi itu kemudian digunakan untuk mencari tahu cara terbaik mengurung wabah dan mencegah bertambahnya penderita baru.

b. Epidemi

Epidemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas. Ketika orang-orang di luar Wuhan mulai terdeteksi mengidap SARS-CoV-2 (yang menyebabkan penyakit bernama Covid-19), para ahli epidemiologi pun tahu bahwa wabah ini telah menyebar luas, yang menandakan bahwa upaya pengurungan tidaklah cukup atau sudah terlambat.

Ini bukan hal mengherankan, mengingat memang belum ada pengobatan atau vaksin yang tersedia. Tetapi penyebaran luas Covid-19 di seluruh Cina berarti bahwa wabah di Wuhan telah berkembang menjadi epidemi.

c. Pandemi

Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah di dunia, ia sudah dianggap pandemi.

Meski demikian, beberapa ahli epidemiologi mengklasifikasikan sebuah situasi sebagai pandemi hanya apabila penyakit itu berkembang di beberapa wilayah yang baru terdampak melalui penularan setempat.

Ilustrasinya begini. Apabila seorang turis Amerika yang terkena Covid-19 pulang dari Cina, maka itu belum pandemi. Tetapi ketika dia menuliri beberapa anggota keluarga atau teman, maka ini pun masih jadi perdebatan (apakah pandemi atau bukan).

Tetapi jika timbul wabah baru setempat, maka para ahli epidemiologi akan setuju bahwa upaya mengendalikan penularan global telah gagal, dan menganggap perkembangan terkini sebagai sebuah pandemi.

Pandemi adalah tingkat tertinggi untuk darurat kesehatan global dan menunjukkan bahwa wabah yang meluas ini mempengaruhi banyak wilayah di dunia. Walaupun begitu, statemen-statemen dari WHO tetap berharap agar pandemi ini bisa dikendalikan dan kerusakannya bisa di minimalisir dengan mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan agresif.

Penetapan resmi Covid-19 atau penyakit menular lainnya sebagai sebuah pandemi akan mendorong pemerintah, badan terkait, serta organisasi bantuan di seluruh dunia untuk mengubah upaya pengurangan (*containment*) menjadi mitigasi.\

Penetapan ini memiliki dampak terhadap sisi ekonomi, politik, dan masyarakat dengan skala global, dan WHO sangat berhati-hati ketika mengambil keputusan ini.

Meski demikian, penetapan resmi WHO tidak perlu membuat kita ketakutan atau buru-buru memborong masker. Ini bukan berarti virusnya makin menular atau tambah mematikan. Bukan pula berarti risiko Anda terkena penyakit ini makin meningkat.

2. Sejarah Munculnya Pandemi

Virus ini dianggap alami dan berasal dari hewan, melalui infeksi spillover, Infeksi manusia pertama yang diketahui

terjadi di Wuhan, Hubei, Cina. Sebuah studi terhadap 41 kasus pertama Covid-19 yang dikonfirmasi, yang diterbitkan pada Januari 2020 di *The Lancet*, melaporkan tanggal paling awal timbulnya gejala sebagai 1 Desember 2019. Publikasi resmi dari WHO melaporkan timbulnya gejala paling awal sebagai 8 Desember 2019. Penularan dari manusia ke manusia dikonfirmasi oleh WHO dan otoritas Tiongkok pada 20 Januari 2020. Menurut sumber resmi Tiongkok, ini sebagian besar terkait dengan Pasar Grosir Makanan Laut Huanan, yang juga menjual hewan hidup. Pada Mei 2020, George Gao, direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, mengatakan sampel hewan yang dikumpulkan dari pasar makanan laut telah dites negatif untuk virus, menunjukkan bahwa pasar tersebut adalah tempat terjadinya superspreading awal, tapi itu bukan lokasi wabah awal. Jejak virus telah ditemukan di air limbah yang dikumpulkan dari Milan dan Turin, Italia, pada 18 Desember 2019.²³

Ada beberapa teori tentang dari mana kasus pertama (yang disebut pasien nol) berasal. Menurut laporan yang tidak dipublikasikan dari pemerintah China, kasus pertama dapat ditelusuri kembali ke 17 November 2019; orang tersebut adalah warga negara berusia 55 tahun di provinsi Hubei. Ada empat pria dan lima wanita yang dilaporkan terinfeksi pada bulan November, tetapi tidak satupun dari mereka yang "pasien nol". Pada Desember 2019, penyebaran infeksi hampir seluruhnya didorong oleh penularan dari manusia ke manusia. Jumlah kasus virus korona di Hubei secara bertahap meningkat, mencapai 60 pada 20 Desember dan setidaknya 266 pada 31 Desember. Pada tanggal 24 Desember, Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirimkan sampel *bronchoalveolar lavage fluid* (BAL) dari kasus klinis yang belum terselesaikan ke perusahaan sekuens *Vision Medicals*. Pada 27 dan 28 Desember, Vision Medicals memberi tahu Rumah Sakit Pusat

²³ Kian Amboro, *Kontekstualisasi Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Sejarah*, Universitas Sebelas Maret, *Historical Studies Journal* Vol. 3 No.2, 2019, h. 90

Wuhan dan CDC China tentang hasil tes, yang menunjukkan virus corona baru. Sekelompok pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya diamati pada 26 Desember dan dirawat oleh dokter Zhang Jixian di Rumah Sakit Provinsi Hubei, yang memberi tahu CDC Wuhan Jiangnan pada 27 Desember. Pada tanggal 30 Desember, laporan pengujian yang ditujukan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan, dari perusahaan CapitalBio Medlab, menyatakan hasil positif yang keliru untuk SARS , menyebabkan sekelompok dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan memberi tahu rekan mereka dan otoritas rumah sakit terkait tentang hasil tersebut. Malam itu, Komisi Kesehatan Kota Wuhan mengeluarkan pemberitahuan ke berbagai institusi medis tentang "pengobatan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya". Delapan dari dokter ini, termasuk Li Wenliang (dihukum 3 Januari), kemudian diperingatkan oleh polisi karena menyebarkan rumor palsu, dan seorang lainnya, Ai Fen , ditegur oleh atasannya karena meningkatkan kewaspadaan.²⁴

Komisi Kesehatan Kota Wuhan membuat pengumuman publik pertama tentang wabah pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pada 31 Desember, mengonfirmasi 27 kasus cukup untuk memicu penyelidikan.

Selama tahap awal wabah, jumlah kasus berlipat ganda kira-kira setiap tujuh setengah hari. Pada awal dan pertengahan Januari 2020, virus menyebar ke provinsi China lainnya, dibantu oleh migrasi Tahun Baru Imlek dan Wuhan menjadi pusat transportasi dan persimpangan kereta api utama. Pada 20 Januari, China melaporkan hampir 140 kasus baru dalam satu hari, termasuk dua orang di Beijing dan satu di Shenzhen. Data resmi kemudian menunjukkan 6.174 orang sudah menunjukkan gejala pada saat itu, dan lebih banyak lagi mungkin telah terinfeksi. Sebuah laporan di *The Lancet* pada 24 Januari menunjukkan penularan pada manusia, sangat merekomendasikan peralatan pelindung pribadi untuk petugas kesehatan, dan mengatakan pengujian virus itu penting karena

²⁴ Ibid., 110

"potensi pandemi". Pada tanggal 30 Januari, WHO menyatakan virus korona sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat Masalah Internasional. Pada saat ini, wabah menyebar dengan faktor 100 sampai 200 kali.

Pada 31 Januari 2020, Italia memiliki kasus pertama yang dikonfirmasi, dua turis dari China. Pada 13 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganggap Eropa sebagai pusat aktif pandemi. Pada 19 Maret 2020, Italia mengambil alih China sebagai negara dengan kematian terbanyak. Pada 26 Maret, Amerika Serikat telah menyusul Cina dan Italia dengan jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi di dunia. Penelitian tentang genom virus corona menunjukkan mayoritas kasus Covid-19 di New York berasal dari wisatawan Eropa, bukan langsung dari China atau negara Asia lainnya. Pengujian ulang sampel sebelumnya menemukan seseorang di Prancis yang mengidap virus pada 27 Desember 2019 dan seseorang di Amerika Serikat yang meninggal akibat penyakit pada tanggal 6 Februari 2020.²⁵

Pada 11 Juni 2020, setelah 55 hari tanpa kasus yang ditularkan secara lokal, Beijing melaporkan kasus COVID-19 pertama, diikuti oleh dua kasus lagi pada 12 Juni. Pada 15 Juni 79 kasus secara resmi dikonfirmasi. Sebagian besar pasien ini pergi ke Pasar Grosir Xinfadi.

3. *Corona Virus Disease 19*

Corona virus disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian.²⁶

²⁵ Ibid., 112

²⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 diakses pada 15 November 2020 pukul 06.55.

Penyakit ini dilaporkan memiliki tingkat mortalitas 2-3%. Beberapa faktor risiko dapat memperberat keluaran pasien, seperti usia >50 tahun, pasien imunokompromais, hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit paru, dan penyakit jantung.

Covid-19 dapat dicurigai pada pasien yang memiliki gejala saluran pernapasan, seperti demam $>38^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, sakit tenggorokan yang disertai dengan riwayat bepergian ke daerah dengan transmisi lokal atau riwayat kontak dengan kasus suspek atau kasus konfirmasi Covid-19. Hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien Covid-19 tidak spesifik, tetapi limfopenia, peningkatan laktat dehidrogenase, dan peningkatan aminotransferase, umumnya sering ditemukan.

Penemuan *ground glass opacification* (GGO) bilateral, multilobar dengan distribusi periferik atau posterior merupakan karakteristik penampakan Covid-19 pada pemeriksaan pencitraan CT scan toraks nonkontras. Walaupun kurang spesifik, ultrasonography (USG) dan Rontgen toraks juga dapat membantu menegaskan diagnosis Covid-19. Diagnosis Covid-19 dapat dikonfirmasi dengan dideteksinya viral RNA pada pemeriksaan nucleic acid amplification test (NAAT), seperti RT-PCR dari spesimen saluran pernapasan, tes antigen, dan tes serologi.²⁷

Sampai saat ini, belum terdapat terapi antiviral spesifik dan vaksin dalam penanganan Covid-19. Akan tetapi, beberapa terapi, seperti remdesivir, dexamethasone, lopinavir-ritonavir, dan tocilizumab ditemukan memiliki efikasi dalam penanganan Covid-19 dan sudah masuk dalam uji coba klinis obat. Pada awal pandemi, beberapa medikamentosa lain, seperti chloroquine, hydroxychloroquine, dan oseltamivir telah diteliti tetapi tidak menunjukkan efektivitas terhadap Covid-19.

²⁷ World Health Organization. Laboratory testing for 2019 novel virus corona (2019-nCoV) in suspected human cases. 2020;2019 (January):1-7.

Pasien Covid-19 dengan infeksi ringan umumnya hanya disarankan isolasi di rumah dan menggunakan obat yang dijual bebas untuk meredakan gejala. Pada pasien dengan infeksi berat, disarankan untuk dirawat inap dan terkadang diperlukan tindakan intubasi dan ventilasi mekanik apabila terjadi gagal napas atau acute respiratory distress syndrome.²⁸

C. Konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Hukum Positif

1. Dasar Hukum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dasar hukum PSBB adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020.

2. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dijelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2018, bahwa:²⁹

Pasal 4 ayat:

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

²⁸ McIntosh K, Hirsch M, Bloom A. Virus corona disease 2019 (COVID-19). UpToDate. 2020. <https://www.uptodate.com/contents/virus-corona-dise>.

²⁹ Lihat Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2018 Pasal 4.

(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.³⁰

3. Syarat-syarat dapat dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

4. Pejabat yang berwenang

Pembatasan Sosial Berskala Besar bisa diberlakukan pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pasal 2 Ayat 1 PP tersebut menyatakan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan PSBB atas izin menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan (Menteri Kesehatan), yang berbunyi :³¹

"Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu".

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1, Pemda harus mengusulkan terlebih dahulu pemberlakuan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya, Menteri Kesehatan akan menetapkan status PSBB yang diusulkan gubernur, wali kota, atau bupati di wilayah mereka masing-masing dengan memperhatikan saran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang berbunyi :³²

³⁰ Ibid.

³¹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 1

³² Ibid.

"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)".

Adapun pemerintah pusat dapat memberlakukan PSBB di suatu wilayah melalui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kepada Menteri Kesehatan. Jika Menteri Kesehatan menyetujui usulan Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pemerintah daerah wajib yang wilayahnya ditetapkan untuk diberlakukan PSBB wajib menjalankan keputusan tersebut.

5. Hak dan kewajiban masyarakat³³

Di masa pandemi Covid-19 ini masyarakat dan pemerintah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak masyarakat sebagai penduduk adalah mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Adapun, kewajibannya adalah menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban memelihara kesehatan dan kesehatan lingkungan.

Sementara itu, pemerintah memiliki hak untuk membuat dan melaksanakan peraturan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sedangkan, kewajibannya adalah memperhatikan kesehatan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Memperhatikan kesehatan masyarakat yang dimaksud dalam kondisi ini salah satunya dengan memberikan tes sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah berhak membuat dan melakukan penegakan peraturan tersebut dengan berkewajiban memperhatikan kesehatan masyarakat dan mengendalikan wabah serta memberikan bantuan sosial akibat kebijakan pencegahan Covid-19 ini. Oleh karena itu dalam menangani situasi wabah saat ini, Indonesia bisa mengacu pada pedoman kapasitas

³³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/12345111/ini-hak-kewajibanpemerintah-dan-warga-negara-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 07.14

sistem kesehatan International Health Regulation (IHR) 8 Core Capacities milik organisasi kesehatan dunia (WHO).

D. Pengertian Sanksi

Pengertian Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).³⁴

Adapun pengertian sanksi secara teoritis, sanksi sosial dan sanksi hukum yaitu:

1. Secara Teoritis Sanksi merupakan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.
2. Sanksi sosial dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang sengaja diberikan oleh sekelompok orang yang telah hidup bersama-sama (masyarakat) kepala salah satu anggotanya sebagai sebuah reaksi atau sebuah tindakan yang dianggap telah menyimpang di dalam masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar si penerima mendapat jera.
3. Sanksi Hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum yang merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum dan dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Sanksi dibagi menjadi tiga yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif, sebagai berikut :³⁵

1. Sanksi pidana

Sanksi hukum disebut hukuman dalam hukum pidana. Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

³⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2010), h. 1823

³⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-/>, diakses 26 November 2020, 07.59.

- a. Hukum Pokok yang terbagi menjadi:
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda.
- b. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2) Perampasan barang yang tertentu
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.

2. Sanksi Perdata

Dalam Hukum Perdata, putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

- a. Keputusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.
- b. Putusan *declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
- c. Putusan *constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- a. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
 - b. hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru
- ## 3. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-

undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:

- a. denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),³⁶
- b. pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009).³⁷
- c. penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008),
- d. tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).

E. Pengaturan Sanksi dalam PSBB

Terkait dengan pemberlakuan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran virus covid-19, tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ada banyak Pro dan Kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagian kelompok masyarakat masih ada saja yang tidak mematuhi aturan kebijakan pemerintah. Masyarakat tetap saja melakukan aksi kumpul bersama di tempat-tempat tongkrongan sambil menyantap makanan dan minuman untuk bersenda gurau bersama teman-temannya. Padahal pemerintah telah melarang aksi ini dengan keras karena dapat meningkatkan resiko penyebaran virus covid-19 dengan cepat. Sekelompok anak muda masih saja melakukan kegiatan sehari-harinya di luar rumah tanpa ada rasa was-was. Pemerintah telah menrencanakan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar kebijakan PSBB ini. DKI Jakarta sebagai daerah pertama yang menerapkan PSBB pada 10 April 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan hingga

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda.

³⁷ Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Keselamatan Penerbangan

tanggal 23 April 2020. Dasar hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah Pasal 93 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ketentuan Pasal 93 yang mengatur bahwa orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijatuhi sanksi pidana selama 1 tahun dan/atau sanksi denda paling banyak seratus juta.³⁸

Berdasarkan Pasal 17 bagian Kesembilan dalam Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB mengatur bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memaparkan cara pemberian sanksi pidana kepada pelanggar, pertama penindakan petugas dari Pemprov DKI yang merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB. Lalu jika pelanggar tidak kooperatif, maka polisi akan turun tangan dengan memberikan sanksi pidana, pelanggar akan dijerat Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 212 atau Pasal 214 KUHP terkait melawan tugas. Tambahan jika pelanggar melawan petugas dengan tidak mengindahkan apa yang disampaikan petugas, melawan dengan kasar maka akan dikenakan undang-undang nomor 6 tahun 2018.³⁹

PSBB ini merupakan objek yang dimaksudkan dalam Pasal 93 dikarenakan PSBB sebagai bentuk dari karantina kesehatan. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan PSBB tersebut. Memang pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB ini di rasa

³⁸ <https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggar-psbb/>, diakses 20 januari 2021, 18.50 WIB.

³⁹ Pasal 17 bagian ke-9 Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB

kurang tepat, tetapi mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mengindahkan kebijakan ini tidak pernah merasa jera jika hanya diberikan sanksi seperti misalnya kerja sosial. Sebagai contoh yang sudah terjadi sebelumnya, sejumlah pelanggar larangan mudik yang hanya diminta pulang kembali oleh aparat yang bertugas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya, perlu penambahan instrumen hukum dalam PSBB agar peran polisi bisa lebih maksimal. Salah satunya dengan menggunakan unsur pidana. Dengan begitu, dia meyakini kepolisian akan lebih leluasa dalam menindak pelanggar PSBB seperti dengan memberi hukuman kurungan.

Akan tetapi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB dirasa kurang tepat. Hal ini didasari pada hakikat dari sanksi pidana itu sendiri, dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium. Maksudnya adalah jika suatu perkara dapat lebih dulu diselesaikan dengan jalur lain maka sebaiknya jalur itu digunakan lebih dulu. Hal ini juga ada kaitannya dengan makna pidana itu sendiri. Menurut Prof Sudarto SH, pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja diberikan pada orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu. Oleh karena sifat pidana yang berupa derita tadi, maka sanksi pidana adalah langkah terakhir untuk menegakkan hukum. Rumusan delik pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 93 jo Pasal 9 UU no. 6 tahun 2018 bersifat umum hingga nyaris abstrak, dimana penjelasan soal bentuk perbuatan ‘tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan’ tidak diperjelas.

Rumusan Pasal ini merupakan sebuah kekeliruan karena berdasarkan hakikat dari asas legalitas dalam hukum pidana, perumusan objek perbuatan dan sanksi pidananya harus dirumuskan dalam satu kesatuan undang-undang. Karena itu, jika Pergub berisi kewajiban masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak dan beberapa ketentuan lain pada masa inkubasi PSBB dan ternyata dilanggar, maka seharusnya bukan sanksi pidana yang dijatuhkan melainkan dapat diterapkan sanksi lain

berupa sanksi denda atau sanksi sosial. Menimbang pengenaan sanksi yang didasarkan pada Undang-Undang Karantina Kesehatan kurang efektif maka satu-satunya cara untuk menjerat pelanggar PSBB dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah dengan mengubah UU itu atau menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Pemidanaan berdasarkan hukum pidana adalah penjatuhan sanksi, penerapan hukum Teori-teori pemidanaan yang dianut Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan yang terakhir adalah teori gabungan. Teori pembalasan mengatakan bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai pembalasan perbuatan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Sedangkan Teori tujuan mengatakan bahwa penjatuhan pidana itu punya tujuan tertentu yang memiliki manfaat salah satunya untuk melindungi masyarakat dan juga untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dan yang terakhir adalah teori gabungan yang muncul sebagai reaksi dari kedua teori sebelumnya, teori ini mengatakan bahwa pemidanaan itu diberikan sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dibuat oleh pelakudan juga diberikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁴⁰ Dalam hal ini, penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelanggar PSBB dirasa kurang tepat karena bobot kesalahan pelanggaran yang dilakukan tidak seberat bobot kesalahan kejahatan yang diatur dalam KUHP sehingga memungkinkan penjatuhan sanksi pidana. Pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan bergerak atau perampasan kemerdekaan, dimana seseorang akan ditempatkan pada suatu tempat khusus yang disebut dengan lembaga permasyarakatan. Pidana penjara biasanya dijatuhi terhadap pelaku kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan perikeadilan, dimana walaupun andai kata perbuatan itu tidak diancam hukuman, ia tetap dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan perikeadilan.

F. Peraturan Daerah Mengenai Pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19

⁴⁰ Wirjono Prodjodoikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Eresco:1981) h, 50.

Kota Metro mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Metro pada tanggal 6 Juli 2020.

Peraturan Walikota tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentingan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara terintegrasi dan efektif di Daerah dan mendorong terwujudnya pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.

Peraturan Walikota ini berisikan tentang penerapan protokol kesehatan dan pembatasan terhadap tempat-tempat ramai seperti pasar, mall, pertokoan, bank, restoran dan sejenisnya, salon dan sejenisnya, serta tempat wisata dan sejenisnya. Ketentuan rapid dan swab test, kekarantinaan, penetapan zona hijau, oranye dan hijau.

Peran gugus tugas terdapat pada pasal 30 yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tatanan normal baru untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kemudian gugus tugas mempublikasikan perkembangan pelaksanaan tatanan normal baru melalui media elektronik maupun media cetak.

Pasal 33 Peraturan Walikota ini mengatur tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. penghentian sementara kegiatan;
4. penghentian tetap kegiatan;
5. pencabutan sementara izin;
6. pencabutan tetap izin;
7. denda administratif; dan/atau
8. Sanksi Administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

⁴¹ Perwali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman pada masa pandemik *corona virus disease* 2019 di Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

Al-Quran dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.

B. BUKU-BUKU

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenada Media, 2014.

Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syarif Mugar, Ibnu, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2014).

Ash-Shidique, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 2014.

Basyir, Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mundur Maju, 1986.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2010).

Lincoln Arsyad, Soeranto, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, Jakarta: Kencana, 2014.

Nasution, S. *Metodologi Penelitian Dasar*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Soekanto, Soerjono dari Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).

Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aliran Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).

Yuyun Yudaningsih at.al, *Pengenalan COVID-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita*, (Bandung: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

C. JURNAL

Aprista Ristyawati, Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan*. Volume 3 Edisi 2 Juni 2020

Kian Amboro, *Kontekstualisasi Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Sejarah*, Universitas Sebelas Maret, *Historical Studies Journal* Vol. 3 No.2, 2019.

Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam”, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry*, Vol 2 No. 1 (2017).

Rina Tri Handayani, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, Joko Tri Atmojo, *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity*, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* Volume 10 No 3, Juli 2020.

Prianter Jaya Hairi, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala BesarTerkait Pencegahan COVID-19, *Info Singkat*, Vol. XII, No. 7, (April, 2020).

Prianter Jaya Hairi, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala BesarTerkait Pencegahan COVID-19, *Info Singkat*, Vol. XII, No. 7, (April, 2020).

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

Keputusan Walikota Metro Nomor: 303/KPTS/LL-01/2020.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2018 Pasal 4.

Pasal 17 bagian ke-9 Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2020
tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 1.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi
Administrasi Berupa Denda.

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 2009 tentang
Sanksi Administratif
Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di
Bidang Keselamatan Penerbangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar

Perwali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 pelaksanaan tatanan
normal baru produktif dan aman pada masa pandemik *corona
virus disease* 2019 di Kota Metro.

E. INTERNET

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Diakses dari
<https://covid19.go.id/>, Pada Tanggal 10 Juli 2020, Pukul 22:41
WIB.

Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, tanggal 22 November 2020 pukul 23.58 WIB.

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 diakses pada 15 November 2020 pukul 06.55.

World Health Organization. Laboratory testing for 2019 novel virus corona (2019-nCoV) in suspected human cases. 2020;2019 (January):1–7.

McIntosh K, Hirsch M, Bloom A. Virus corona disease 2019 (COVID-19). UpToDate. 2020. <https://www.uptodate.com/contents/virus-corona-dise>.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Diakses dari <https://covid19.go.id/>, Pada Tanggal 10 Juli 2020, Pukul 22:41 WIB.

Universitas Islam Indonesia, <https://www.uii.ac.id/bagaimana-islam-memandang-pandemi-covid-19/diakses> pada 13 November, 09.16.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/12345111/ini-hak-kewajiban-pemerintah-dan-warga-negara-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 07.14

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>, diakses 26 November 2020, 07.59.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200313/15/1213167/jokowi-resmi-bentuk-gugus-tugas-penanganan-covid-19-kepala-bnpb-jadi-ketua>, diakses 20 Desember 2020 18.00 WIB

<http://djsn.go.id/index.php/berita/detail/lima-tujuan-gugus-tugas-penanganan-covid-19>, di akses 23 Desember 2020 07.40

<https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggar-psbb>, di akses 20 Desember 2020 20.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-/>, diakses 26 November 2020, 07.59.

F. WAWANCARA

Peltu Khairunsyah, wawancara dengan penulis, Perwakilan DanRamil Kota Metro, 24 Februari 2021.

IPTU Endang Yasmudi, S.H, wawancara dengan penulis, Kapolsek Metro, 24 Februari 2021.

Ibu Hesty, wawancara dengan penulis, Perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, 24 Februari 2021.

Bapak Iskandar Johari, wawancara dengan Penulis, Kabid Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro, 24 Februari 2021.

Ansyori, A.Md, wawancara di Kota Metro tanggal 24 Februari 2021, wawancara dengan penulis, Lurah Tejo Sari Metro Timur.

Drs. Jonizar Arifin, MM, wawancara di Kota Metro tanggal 24 Februari 2021, wawancara dengan penulis, Camat Metro Timur..